

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, Selika., dan Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana. https://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16696/1/Hukum%20dan%20Hak%20Azazi%20Manusia_Serlika.pdf.
- Badruzaman, Dudi. "Kajian Hukum tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019). https://www.researchgate.net/publication/338511715_Kajian_Hukum_Tentang_Internet_Mobile_dalam_Upaya_Pencegahan_Dampak_Negatif_Teknologi_Informasi_dan_Komunikasi_di_Indonesia.
- Chairul Huda, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute. https://www.google.co.id/books/edition/METODE_PENELITIAN_HUKUM_Pendekatan_Yurid/xySyEAAQBAJ?hl=en&gbpv=1.
- Deliana HZ, Evi. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2013). https://www.researchgate.net/publication/373249732_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Dari_Konten_Berbahaya_Dalam_Media_Cetak_Dan_Elektronik.
- DetikJateng, Amir Baihaqi, "Pemuda Magelang Jadi Tersangka Penjualan 2.500 Video Porno Anak", <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7977893/pemuda-magelang-jadi-tersangka-penjualan-2-500-video-porno-anak>.
- Diskominfo Jawa Tengah, <https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/profil/tugas-dan-fungsi-ppid-pelaksana/>.
- Diskominfo Jawa Tengah. Berita, "Si Mega Ruber", Upaya Jateng Perkuat Keamanan Informasi, [https://diskominfo.jatengprov.go.id/2023/publik/berita_baca/MmY4Y2I1NjJhZDc1YzUxNzFkNTI1YmNmMzA3NzA5ZDc0ZmEyOTUzYjM5NGRmNTQ1YTExYjUxMWNmZjM3ZjA5#:~:text=Karenanya%2C%20Pemerintah%20Provinsi%20Jawa%20Tengah,Ruang%20Siber%20\(Si%20Mega%20Ruber\)](https://diskominfo.jatengprov.go.id/2023/publik/berita_baca/MmY4Y2I1NjJhZDc1YzUxNzFkNTI1YmNmMzA3NzA5ZDc0ZmEyOTUzYjM5NGRmNTQ1YTExYjUxMWNmZjM3ZjA5#:~:text=Karenanya%2C%20Pemerintah%20Provinsi%20Jawa%20Tengah,Ruang%20Siber%20(Si%20Mega%20Ruber)).
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi pertama. Depok: Prenadamedia Group.
- Esi, Syafitriwan Alya. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Pemerintah terhadap Anak Sebagai Penonton Youtube Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Academy of Management Journal* 5, no. 3 (2002). <https://repository.unmuhjember.ac.id/12843/8/H.%20ARTIKEL.pdf>.

- Firdausya, Ihfa. Survei: 87% Anak Indonesia Main Medsos sebelum 13 Tahun, Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/398511/survei-87-anak-indonesia-main-medsos-sebelum-13-tahun>.
- Gayatri, Gati. 2023. *Pers, Pornografi, dan Politik*. Yogyakarta: Jejak Pustaka. https://www.google.co.id/books/edition/Pers_Pornografi_dan_Politik_Jeak_Pustak/K2_JEAAAQBAJ.
- Gramedia.com, Pengertian Jaringan Internet: Sejarah, Fungsi, Manfaat, dan Dampaknya, Internet, <https://www.gramedia.com/literasi/jaringan-internet/?srltid=AfmBOopEKEhBPI4E6UKZowKry7Fm9-vtZyLAzE9EFRRacdGUXswE8upi>.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, et al. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group. <https://perpustakaan.stietotalwin.ac.id/pdf/17.pdf>.
- Hukumonline.com, Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.
- Irianto, Sulistyowati., dan Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Joni, Muhammad., dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>.
- Kara, Maria Elevenssa, “KPAI: 5,5 Juta Anak Indonesia Kecanduan Pornografi, Radio Republik Indonesia”, <https://rri.co.id/daerah/824614/kpai-5-5-juta-anak-indonesia-kecanduan-pornografi>.
- Kasus Pornografi, Prostitusi, dan Eksploitasi Cenderung Meningkat https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pornografi%2C_prostitusi%2C_dan_eksploitasi_cenderung_meningkat.
- Kemenkes RSAB Harapan Kita, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Anak”, <https://www.rsabhk.co.id/artikel-kesehatan/pengaruh-media-sosial-terhadap-perilaku-anak>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, “Awasi Anak Kita terhadap Ancaman Pornografi”, <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/awasi-anak-kita-terhadap-ancaman-pornografi/>.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).

Komdigi, Komdigi, <https://www.komdigi.go.id/>.

Kompas.com, “Sejumlah Anak di Pati Dirawat di Bangsal Kejiwaan Akibat Keranjinan “Game” dan Konten Porno”, <https://regional.kompas.com/read/2023/01/30/140729278/sejumlah-anak-di-pati-dirawat-di-bangsas-kejiwaan-akibat-keranjinan-game>.

KPAI, “KPAI: Pantau Konten Negatif, Kominfo Punya Trust Positif”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pantau-konten-negatif-kominfo-punya-trust-positif>.

KPAI, Pemenenuhan Hak Anak atas Akta Kelahiran Merupakan Bagian dari Hak Sipil yang Harus Dilindungi Konstitusi. <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi>.

LaporGub!, <https://laporgub.jatengprov.go.id/>.

Loekmono, Lobby. 1988. Seksualitas, Pornografi & Pernikahan. Semarang: Satya Wacana.

Medcom.id, Muhammad Syahrul Ramadhan, “Pria Asal Kendal Ditangkap karena Jadi Bandar Video Porno Sejak 2023 di Telegram”, https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/Dkq0mBpb-pria-asal-kendal-ditangkap-karena-jadi-bandar-video-porno-sejak-2023-di-telegram#google_vignette.

Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Sadi Muhammad. 2021. *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana. https://www.google.co.id/books/edition/Aspek_Hukum_Informasi_Indonesia/TiwzEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&pg=PA48&printsec=frontcover.
- Sanjaya, Ridwan., Christine Wibhowo., dan Arista Prasetyo Adi. 2010. *Parenting untuk Pornografi di Internet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sitompul, Asril. 2001. *Hukum Internet (Pengenalannya Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Sumiarni, Endang., dan Chandra Halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

UNICEF. 2014. The Convention On the Rights of the Child: The Children's Version. <https://www.unicef.org/media/60981/file/convention-rights-child-text-child-friendly-version.pdf>.

